



# Anggaran

## Mendagri Sahkan Pergub APBD 2015

JAKARTA, KOMPAS — Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyatakan telah mengesahkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DKI Jakarta Tahun 2015. Langkah itu ditempuh Kemendagri setelah tidak ada kesepakatan antara Pemerintah Provinsi dan DPRD DKI Jakarta terkait Peraturan Daerah tentang APBD DKI Jakarta 2015.

"Hari ini sudah kami serahkan Pergub APBD DKI Jakarta yang sudah diverifikasi dan dicek ulang tentang beberapa skala prioritas yang harus masuk pergub itu," kata Tjahjo, Rabu (1/4), di Kantor Presiden.

Ia berharap, dengan pergub yang sudah disahkan itu masih ada waktu bagi Gubernur dan DPRD DKI untuk membahas APBD perubahan. "Soal kapan waktunya, terserah antara Gubernur dan DPRD apakah mau ada perubahan atau tidak," ujar Tjahjo.

### Tersangka lain

Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri Komisaris Besar Rikwanto, Rabu, mengatakan, setelah pemeriksaan AU dan ZS sebagai tersangka dugaan korupsi UPS di Jakarta, tidak tertutup kemungkinan tim penyidik menetapkan tersangka lain.

"Setelah pemeriksaan keduanya, dilakukan gelar perkara lagi untuk menetapkan langkah penyidikan berikutnya. Tidak tertutup kemungkinan ditetapkan tersangka baru. Ini karena banyak yang terlibat dalam kasus dugaan korupsi dalam pembelian UPS tersebut," katanya.

Rikwanto menolak menyebutkan nama calon tersangka berikutnya itu, tetapi kemungkinan berasal dari DPRD DKI Jakarta. "Proyek pengadaan dan pembelian barang tidak mungkin terjadi jika tidak ada persetujuan ketiga pihak, yakni dari pihak eksekutif, legislatif, dan swasta," katanya.

Penyidik memperkirakan ke-

rugian negara sekitar Rp 50 miliar. Namun, nilai pastinya menunggu hasil audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

Terkait penetapan PNS di lingkungan Pemprov DKI Jakarta, Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama mempersilakan penegak hukum menyelesaikannya. Dia tak ambil pusing meski kedua tersangka pejabat struktural.

AU adalah Kepala Seksi Sarana Prasarana Suku Dinas Pendidikan Jakarta Selatan. Adapun ZS menjabat Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda DKI Jakarta. "Jika waktunya terganggu karena harus memenuhi panggilan penyidik, kami akan cari penggantinya. Dalam waktu dekat akan ada lelang jabatan," kata Basuki.

### Sidang angket

Rapat Badan Musyawarah DPRD DKI Jakarta kemarin memutuskan menunda rapat paripurna tentang laporan panitia angket pada Senin (6/4) lalu. Rapat sedianya digelar Kamis (2/4) ini, tetapi ditunda, antara lain, karena benturan waktu dengan jadwal musyawarah perencanaan pembangunan.

Anggota panitia angket DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Gerindra, Syarif, mengatakan, kesimpulan panitia angket telah bulat. Langkah Basuki melayangkan rancangan peraturan daerah tentang APBD tahun 2015 yang bukan hasil pembahasan dengan DPRD dinilai melanggar prosedur sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik menambahkan, kemungkinan besar DPRD akan menggunakan hak menyatakan pendapat. Hak itu adalah hak DPRD untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan kepala daerah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di daerah disertai rekomendasi penyelesaian.

(WHY/RTS/FRO/MKN/RAY)